

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih banyak merebak dan menjadi fokus banyak kelompok masyarakat serta pemerintah. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang dan menciptakan kemajuan suatu negara. Pendidikan sendiri dapat dilihat berdasarkan kategori pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal mencakup proses yang berstruktur, bertingkat, dan berjenjang yang berlangsung dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, termasuk studi akademik dan umum, program khusus, dan pelatihan profesional berkelanjutan.¹ Hal ini memerlukan pengejaran pengetahuan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Karena bersifat berjenjang dan terstruktur, maka pendidikan formal menjadi pendidikan yang paling mendominasi di sebuah masyarakat. Sedangkan, pendidikan nonformal mengacu pada kegiatan terorganisir dan sistematis yang terjadi di luar sistem sekolah formal, yang dapat dilakukan secara mandiri atau sebagai bagian integral dari inisiatif yang lebih luas, dengan tujuan membantu siswa tertentu mencapai tujuan pembelajaran mereka.²

Dalam aspek pendidikan, khususnya pendidikan anak, aspek sosio-emosional menjadi penting untuk dipahami. Kemampuan sosio-emosional seorang anak mengacu pada kemampuan mereka untuk mengarahkan emosi mereka sendiri dalam hubungannya dengan orang lain, menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia.³ Kemampuan sosio-emosional seorang anak dapat memainkan peran kunci dalam mencegah perilaku destruktif.⁴ Melalui pemahaman emosional dan

¹ Philip H. Coombs, Manzoor Ahmed, “*Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help*”, (Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1974). hlm. 39.

² *Ibid.*,

³ Ika Agustin Adityawati, dkk, “*Perkembangan Sosio-Emosional Pada Anak Usia Dini*”, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2018), hlm. 36.

⁴ Hasil wawancara dengan Psikolog Anak, MY, 25 Desember 2023.

kemampuan berinteraksi secara positif dengan orang lain, dapat membantu anak-anak untuk mengatasi tantangan dan frustrasi mereka dengan cara yang lebih sehat. Dengan memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, anak-anak dapat lebih baik berkomunikasi tentang kebutuhan mereka, sehingga orang dewasa dapat memberikan dukungan yang sesuai. Dengan memahami kebutuhan dasar mereka yang mungkin belum terpenuhi, anak dapat diberikan dukungan yang lebih terarah dan efektif, sehingga mereka tidak merasa terpaksa untuk mengungkapkan diri melalui aksi destruktif. Aksi-aksi atau tindakan destruktif yang dilakukan anak salah satunya berbentuk tindakan menyimpang seperti kriminalitas pada anak.⁵

Seto Mulyadi, yang merupakan bagian dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kriminalitas yang menyeret pelaku anak usia dini dan remaja adalah kekacauan sistem pendidikan di Indonesia.⁶ Menurut Seto Mulyadi, sistem pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Dasar didominasi dengan kegiatan menghafal dan anak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah. Hal ini membuat ajaran moral dan etika kurang ditekankan, yang menjadi banyak terjadinya kriminalitas anak. Dengan pendapat Seto Mulyadi tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan berjenjang yang dapat dikategorikan sebagai pendidikan formal tidaklah cukup dalam memenuhi pendidikan anak. Di sisi lain, Joesoef dalam bukunya “Pendidikan Luar Sekolah” juga menyatakan bahwa pendidikan nonformal jelas memegang peranan yang penting dan dapat melengkapi pendidikan formal yang ada sekarang ini.⁷

Dengan berbagai data yang telah penulis paparkan pada tulisan ini, maka dengan adanya permasalahan pendidikan yang nyata khususnya pada pendidikan anak, oleh

⁵ Hasil wawancara dengan Psikolog Anak, MY, 25 Desember 2023.

⁶ Nadia Zahra, “*Kasus Kriminalitas Anak Akibat Kacaunya Sistem Pendidikan*”, diakses melalui <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2014/05/12/1304427/kasus-kriminalitas-anak-akibat-kacaunya-sistem-pendidikan#aoh=16881102230135&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=From%20%251%24s> pada 10 Juni 2023.

⁷ Soelaiman Joesoef, Slamet Santoso, “*Pendidikan Luar Sekolah*”, (Surabaya: CV Usaha Nasional, 1979). hlm. 56.

karena itu dibutuhkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Anak, pada dasarnya didefinisikan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.⁸ Masalah utama yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah yang berkaitan dengan tidak cukupnya pendidikan formal bagi anak dan diperlukannya pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan formal pada anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.⁹ Maka dari itu ini jelas dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak yang dijamin oleh negara sehingga pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh anak dapat dirasakan secara utuh secara kualitas. Keutuhan ini dapat dipenuhi melalui pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan nonformal.

Pendidikan sendiri merupakan hak dasar bagi setiap anak, dan mendukung pendidikan mereka sangatlah penting untuk memastikan bahwa mereka menerima kesempatan terbaik dalam hidup. Sayangnya, masalah pendidikan anak banyak terjadi di Indonesia termasuk di kota besar seperti Jakarta, yang menghambat kemampuan anak untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Menyokong pendidikan anak-anak berarti memberi mereka alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam pengejaran akademis mereka. Ini termasuk akses ke pendidikan berkualitas, dukungan dari orang tua dan pengajar, serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Pendidikan menjadi hak dasar bagi tiap anak, termasuk anak-anak yang tergolong sebagai anak-anak miskin. Di Indonesia sendiri, indikator kemiskinan dapat ditentukan berdasarkan indikator yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

⁹ Undang-Undang Dasar 1945

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.¹⁰

Salah satu manfaat paling signifikan dari meningkatkan kualitas pendidikan anak khususnya anak miskin adalah membantu mengatasi banyak hambatan yang dapat menghambat anak mencapai potensi penuh mereka. Anak-anak yang menerima pendidikan berkualitas sejak usia dini lebih cenderung tidak mengalami keterlambatan perkembangan kognitif dan sosial mereka. Mereka juga lebih siap untuk memasuki sekolah dasar dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk berhasil secara akademis. Peningkatan kualitas pendidikan anak juga dapat membantu mengatasi masalah ketimpangan pendidikan. Anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung seringkali memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas, yang dapat menyebabkan kesenjangan prestasi yang melebar antara mereka dan teman sebayanya yang lebih beruntung.

Dengan memberi anak-anak miskin ini sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil, maka hal tersebut dapat membantu menyamakan kedudukan dan memberi mereka kesempatan yang adil untuk berhasil. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan anak miskin sangat penting untuk mengatasi banyak tantangan yang dihadapi anak-anak dalam pengejaran akademis mereka. Dengan memberi anak-anak sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil, maka hal tersebut dapat membantu memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka. Orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memelihara yang membantu semua anak berkembang.

Dalam mendukung pendidikan anak miskin, hal tersebut berarti melakukan upaya untuk bisa mengisi kekosongan pendidikan formal yang tidak dapat diterima oleh anak.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, 2023.

Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung pendidikan anak miskin adalah dengan melalui pendidikan nonformal. Pendidikan formal sendiri memang merupakan hal esensial dan merupakan hak bagi tiap anak. Akan tetapi, sayangnya, pendidikan formal masih menyisakan kekosongan yang dapat diisi oleh pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal dapat muncul sebagai alternatif penting untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidacukupan pendidikan formal.

Pendidikan nonformal mengacu pada kegiatan terorganisir dan sistematis yang terjadi di luar sistem sekolah formal, yang dapat dilakukan secara mandiri atau sebagai bagian integral dari inisiatif yang lebih luas, dengan tujuan membantu siswa tertentu mencapai tujuan pembelajaran mereka.¹¹ Ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individu yang belum memiliki kesempatan untuk mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal. Pendidikan nonformal dapat mengambil banyak bentuk, termasuk pelatihan kejuruan dan pendidikan kecakapan hidup, yang tentu saja akan disesuaikan dengan target pendidikan nonformal tersebut.

Keuntungan lain dari pendidikan nonformal adalah fleksibilitasnya. Program pendidikan nonformal dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap peserta didik, dengan mempertimbangkan usia, minat, dan gaya belajar mereka. Fleksibilitas ini memungkinkan pendidikan nonformal untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari individu yang berbeda. Dengan demikian, pendidikan nonformal dapat menjadi alternatif penting untuk pendidikan formal. Ini membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidacukupan pendidikan formal dan memberikan kesempatan bagi individu yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal.

Di antara pengelolaan pendidikan formal dan nonformal, terdapat penyelenggaraan pendidikan yang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi

¹¹ Philip H. Coombs, Manzoor Ahmed, “*Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help*”, (Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1974). hlm. 39.

dilakukan oleh organisasi-organisasi di tingkat masyarakat, yakni CSO. Dalam penelitian ini, *Civil Society Organizations* (CSOs) atau Organisasi Masyarakat Sipil dilihat sebagai pihak yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakcukupan pendidikan formal tersebut. CSOs sendiri memiliki definisi yang beragam, salah satunya pengertian dari *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut PBB, *Civil Society Organizations* (CSOs) atau *Non-Governmental Organization* (NGOs) adalah kelompok warga yang bersifat sukarela dan nonprofit yang diorganisir di tingkat lokal, nasional atau internasional.¹² Sebagai sebuah organisasi nonprofit, CSOs dinilai memiliki peran dalam berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan.

Maka dari itu, CSOs yang bergerak dalam bidang pendidikan diperlukan dalam hal ini. Secara spesifik, CSOs yang dimaksud adalah CSOs yang dapat menyediakan layanan pendidikan nonformal sebagai alternatif pendidikan formal. CSOs yang bergerak di bidang pendidikan sangat berperan dalam pendidikan anak miskin, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal sebagai alternatif pendidikan formal. CSOs dapat memainkan peran penting dalam melengkapi sistem pendidikan formal, khususnya dalam situasi di mana sistem pendidikan formal tidak memadai atau tidak dapat diakses oleh beberapa anak.

Program pendidikan nonformal yang disediakan oleh CSOs dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak ini dan dapat disampaikan dengan cara yang fleksibel dan mudah diakses. CSOs juga dapat memberikan beragam kesempatan belajar yang melengkapi pendidikan formal. Sehingga, sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan sangat penting dalam pendidikan anak miskin, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal sebagai alternatif dari pendidikan formal. CSOs yang bergerak dalam bidang pendidikan dapat mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh sistem pendidikan formal, memberikan anak-anak

¹² United Nations. Diakses melalui <https://www.un.org/en/civil-society/page/about-us> pada tanggal 10 April 2023.

berbagai kesempatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mereka.

Jakarta sendiri menjadi rumah bagi beragam CSO yang berdedikasi pada berbagai tujuan. Dengan banyaknya CSO yang berkembang di Jakarta, terdapat salah satu organisasi nirlaba berbasis *online* yang menjadi wadah bagi banyak CSO di Jakarta, yaitu IndoRelawan. IndoRelawan berfungsi sebagai *platform* yang menghubungkan organisasi sosial yang membutuhkan relawan dengan individu yang ingin menyumbangkan waktu dan keterampilannya. Menurut data yang diambil dari situs resmi IndoRelawan (indorelawan.org), sebanyak 432 CSO terdaftar yang secara khusus berfokus pada sektor pendidikan. Jaringan organisasi yang kuat ini menggarisbawahi pentingnya menangani aspek pendidikan dalam masyarakat. Dengan memahami lebih dalam data CSO yang terdapat di Jakarta, khususnya yang berkonsentrasi pada pendidikan, kemudian dapat diarahkan secara lebih efektif seluk-beluk keterlibatan dan kontribusi Swayanaka Jakarta, yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini.

Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pendidikan formal, Swayanaka Jakarta menjadi salah satu *civil society organization* (CSO) yang bergerak dalam bidang pendidikan. Swayanaka Jakarta adalah CSO bersifat nonprofit atau nirlaba yang aktif di bidang kesejahteraan anak khususnya pada aspek pendidikan anak. Swayanaka Jakarta merupakan cabang dari Swayanaka Indonesia yang berpusat di Surabaya. Swayanaka Indonesia telah berdiri sejak 1978, dan sampai saat ini sudah memiliki enam regional di berbagai wilayah di Indonesia. Memiliki tujuan dan fokus yang sama, Swayanaka Jakarta yang merupakan cabang dari Swayanaka Indonesia menjadi bukti bahwa Swayanaka terus berupaya untuk memperluas jangkauan dalam meningkatkan kesejahteraan anak khususnya pada aspek pendidikan. Hal ini menunjukkan konsistensi yang kuat dari Swayanaka sehingga tetap bisa menjadi CSO yang aktif selama lebih dari empat dekade.

Kontribusi penting Swayanaka Jakarta meliputi dedikasi dan komitmen para relawan dan stafnya. Swayanaka Jakarta dijalankan oleh sukarelawan yang dilatih dan didukung oleh Swayanaka Jakarta. Pendekatan ini memastikan bahwa program

pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan disampaikan oleh orang-orang yang memahami konteks pembelajaran apa yang ingin disampaikan dan menjadi tujuan Swayanaka Jakarta. Urgensi penelitian ini adalah karena berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup. Terdapat kebutuhan mendesak akan pendidikan nonformal yang dapat difasilitasi oleh CSO yang bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan saat ini memerlukan keterlibatan organisasi-organisasi yang berperan sebagai aktor dalam pendidikan non-formal. Oleh karena itu, keterlibatan CSO menjadi penting untuk mengisi kesenjangan dalam pendidikan formal melalui penyediaan inisiatif pendidikan non-formal.

Dengan demikian, berdasarkan urgensi tersebut, penulis memilih Swayanaka Jakarta sebagai CSO dalam penelitian ini disebabkan konsistensinya sebagai organisasi yang berkontribusi dalam pendidikan anak. Sehingga, perlu untuk mengulik lebih lanjut apa saja peran yang telah dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan anak.

1.2 Rumusan Permasalahan Penelitian

Peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Namun demikian, terlepas dari pentingnya pendidikan, masih terdapat masalah dalam pendidikan khususnya jika pendidikan dilihat sebagai formal dan nonformal. Pendidikan formal dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kualitas pendidikan, secara spesifik dalam pendidikan anak. Masih belum cukupnya pendidikan formal ini menciptakan masalah dalam pendidikan anak. Sehingga, dengan kekosongan yang diciptakan pendidikan formal tersebut, dalam penelitian ini dinilai diperlukannya pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan nonformal. Salah satu pihak yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak melalui pendidikan nonformal tersebut adalah *civil society organization*. Swayanaka Jakarta sendiri adalah CSO yang menyadari pentingnya pendidikan dan berupaya

membekali individu dan masyarakat dengan menyediakan pendidikan nonformal dan program bantuan lainnya.

Masalah penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Swayanaka Jakarta sebagai sebuah CSO menjalankan perannya dalam pendidikan anak miskin, dan apa dampak dari peran mereka terhadap pendidikan anak miskin. Masih adanya kekosongan yang ditinggalkan oleh pendidikan formal menjadi fokus masalah utama dalam penelitian ini. Sehingga, secara khusus, penelitian ini akan menyelidiki strategi dan program yang dilaksanakan oleh Swayanaka Jakarta untuk mempromosikan layanan pendidikan nonformal, serta efektivitas upaya tersebut dalam meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji dampak jangka panjang dari peran Swayanaka Jakarta terhadap hasil pendidikan anak-anak di komunitas yang mereka layani.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui temuan dari penelitian ini yang akan memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang peran CSO dalam mempromosikan pendidikan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan upaya tersebut. Dengan demikian, penulis merumuskan tiga masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana program Swayanaka Jakarta diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan anak miskin?
2. Bagaimana manfaat yang dihasilkan dari peran Swayanaka Jakarta dalam pendidikan anak miskin?
3. Bagaimana Swayanaka Jakarta berperan dalam pendidikan anak miskin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana program Swayanaka Jakarta diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan anak miskin.
2. Mendeskripsikan bagaimana manfaat yang dihasilkan dari peran Swayanaka Jakarta dalam pendidikan anak miskin.
3. Mendeskripsikan bagaimana Swayanaka Jakarta berperan dalam pendidikan anak miskin.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk penulis itu sendiri, pejabat pemerintah, pembaca, dan calon penulis selanjutnya. Penelitian ini memberikan manfaat teoretis dan praktis, yang diuraikan di bawah ini:

a) Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dengan memberikan wawasan yang berharga, khususnya untuk bidang kajian sosiologi pendidikan.
2. Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

b) Manfaat Praktis:

1. Hasil penelitian dapat memberikan informasi penting bagi masyarakat, menunjukkan bagaimana Swayanaka Jakarta dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan anak khususnya dalam bidang pendidikan melalui berbagai program yang diusungnya.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Dalam menjalankan proses penelitian, sangat penting untuk melakukan tinjauan terhadap penelitian sejenis. Hal ini dilakukan agar penelitian sejenis bisa menjadi bahan perbandingan sekaligus dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian

selanjutnya. Dengan adanya tinjauan terhadap penelitian sejenis, penulis juga dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian tersebut sehingga penulis dapat melengkapi dan memperbaiki kekurangan tersebut. Dalam penelitian yang sedang dikaji ini, penulis telah melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian sejenis yang serupa dengan tema penelitian ini, selanjutnya penulis akan membuat sebuah ringkasan dari penelitian relevan yang telah dikumpulkan.

Tinjauan penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian penulis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan fokus tiap penelitian. Peran CSO dalam pemenuhan hak pendidikan mencatat bagaimana CSO dapat membantu mengisi celah dalam sistem pendidikan di negara-negara berkembang. Mulai dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menilai dampak lingkungan hingga peran mereka dalam memberdayakan komunitas rentan. **Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Mark Aspinwall dengan judul penelitian *Bringing rights to life: How civil society organizations help guarantee participation rights in developing countries*.¹³ Penelitian ini menjelaskan bahwa di negara-negara berkembang, kelemahan dalam institusi negara berarti bahwa hak untuk berpartisipasi dalam Penilaian Dampak Lingkungan atau *Environmental Impact Assessment (EIA)* sering diabaikan. Hal tersebut menyebabkan komunitas rentan tidak menyadari hak mereka, dan membuat mereka merasa tidak mampu untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil telah dilihat dapat menjadi pengisi kesenjangan ini. Penelitian ini mengambil sumber dokumen dari institusi publik, wawancara dengan personel CSOs dan kementerian lingkungan, laporan CSO, dan sumber sekunder dari media lokal dan akademisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Meksiko, organisasi masyarakat sipil menggunakan keterampilan dan pengalaman mereka dalam informasi, komunikasi, hukum, dan aspek lainnya untuk menghubungkan komunitas ke proses EIA, sehingga

¹³ M. Aspinwall, "Bringing rights to life: How civil society organizations help guarantee participation rights in developing countries", (Journal of The Extractive Industries and Society 8, 2021): 1-8.

hak mereka untuk berpartisipasi menjadi nyata. Sehingga hal ini juga membuktikan bahwa CSOs yang terletak di posisi sentral memainkan peran kunci dalam memperbaiki kekurangan negara. **Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Ilam Khan Bajauri, Sadia Riaz, dan Sabeha Rasheed dengan judul penelitian *Role of Civil Society Organizations in FATA Education*.¹⁴ Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana CSOs dianggap sebagai utusan perdamaian dan pendidikan di *Federally Administered Tribal Areas* (FATA). Penelitian ini berfokus pada program-program CSOs yang berjalan di FATA dan dampak langsung atau tidak langsung mereka pada sistem pendidikan di daerah tersebut. Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif, terdiri dari wawancara langsung mendalam dan FGD dengan siswa, penduduk lokal, dan para stakeholder lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila kaum muda diberikan kesempatan untuk pendidikan dan pekerjaan, mereka akan memberikan keuntungan besar dalam perdamaian, pembangunan, dan pembentukan negara.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Youssef Nait Belaid dengan judul penelitian *Participatory governance in Moroccan education: What role for civil society organizations (CSOs)?*.¹⁵ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meskipun sistem pendidikan Maroko telah mengalami reformasi yang cukup besar (1999, 2009, dan 2015) terkait pendidikan, akan tetapi Maroko masih menghadapi kesenjangan komunikasi dan mobilisasi yang signifikan antara hierarki dan birokrasi publik, serta dinamika organisasi masyarakat sipil (CSOs). Penelitian ini dilakukan berdasarkan survei dan wawancara dengan 12 CSOs Maroko yang bekerja di bidang pendidikan, dengan mengeksplorasi hubungan antara pelaku CSOs dan pengambil keputusan pendidikan dalam meningkatkan pengelolaan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus dan praktik CSOs Maroko mengungkap kompleksitas

¹⁴ I. Bajauri, S. Riaz, & S. Rasheed, "Role of Civil Society Organizations in FATA Education", (Journal of Global Social Sciences Review I, no. I, 2016): 39-47.

¹⁵ Y. N. Belaid, "Participatory governance in Moroccan education: What role for civil society organizations (CSOs)?", (International Journal of Humanities and Social Science 9, no. 6, 2021): 2321-9467.

hubungan mereka dengan layanan pendidikan publik dalam hal evaluasi dan tindakan pemantauan dan proyek. Hal ini mengungkapkan lebih banyak tentang reformasi administrasi pendidikan dan evolusi masyarakat sipil di Maroko. **Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Patricia Bromley, Evan Schofer, dan Wesley Longhofer dengan judul penelitian *Organizing for Education: A Cross-National, Longitudinal Study of Civil Society Organizations and Education Outcomes*.¹⁶ Penelitian ini membahas dua pandangan dari teori organisasi untuk mempertimbangkan ekspansi dan dampak organisasi nirlaba di bidang pendidikan: pertama, pandangan fungsional dan pandangan fenomenologis neo-institusional. Panel regresi model digunakan dengan efek tetap negara untuk menganalisis ekspansi CSOs pendidikan domestik di 130 negara dari tahun 1970 hingga 2014. Kemudian dilakukan penelitian terkait hubungan antara ukuran sektor CSOs pendidikan domestik dan keanggotaan dalam Organisasi Non-Pemerintah Internasional atau *International Non-Governmental Organization* (INGO) dengan hasil pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan INGO, negara yang terbuka, dan sistem pendidikan yang terbuka berkaitan erat dengan ekspansi sektor CSOs pendidikan domestik. Baik CSOs domestik maupun keanggotaan INGO cenderung memiliki hubungan positif dan signifikan dengan hasil pendidikan terlepas dari faktor lainnya.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang memiliki fokus pada penyelenggaraan pendidikan lingkungan oleh CSO. **Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Damoah dan Emmanuel Olusola Adua dengan judul penelitian *Environmental Education in South African Schools: The Role of Civil Society Organizations*.¹⁷ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup atau *Environmental Education* (EE) adalah salah satu komponen penting dari dokumen Kebijakan Kurikulum dan Evaluasi atau *Curriculum and*

¹⁶ P. Bromley, E. Schofer, & W. Longhofer, "Organizing for Education: A Cross-National, Longitudinal Study", (International Society for Third-Sector Research 29, no. 3, 2018).

¹⁷ B. Damoah & E. Adu, "Environmental Education in South African Schools: The Role of Civil Society Organizations", (Journal of Research in Social Sciences and Technology 7, no. 3, 2022): 1-17.

Assessment Policy Statement (CAPS) di Afrika Selatan. Organisasi masyarakat sipil Pro-EE terlibat aktif dalam implementasi kebijakan EE di sekolah-sekolah. Studi ini mengadopsi paradigma interpretatif, pendekatan kualitatif, dan desain fenomenologis yang bersandar pada pandangan filosofis Bronfenbrenner tentang perkembangan manusia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa organisasi masyarakat sipil Pro-EE berkontribusi pada program lingkungan praktis, dan memainkan peran penting yang meliputi; melengkapi peserta didik untuk hidup secara berkelanjutan, pengembangan profesional guru, dan formulasi kebijakan.

Penelitian selanjutnya memiliki fokus pada penggambaran peran CSO dalam pembangunan. **Keenam**, penelitian yang dilakukan oleh Ari Ganjar Herdiansah dan Randi dengan judul penelitian Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia.¹⁸ Penelitian ini mendeskripsikan peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipandang berperan dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada kajian literatur. Ormas dan LSM memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas politik dan sosial dengan menengahi berbagai kepentingan antar kelompok masyarakat. Namun, pada kenyataannya, situasi sosial dan ekonomi di Indonesia masih sangat rendah. Kondisi tersebut memaksa beberapa pihak untuk memanfaatkan Ormas dan LSM demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengatasi dan memperjelas peran Ormas dan LSM menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam upaya memperkuat peran mereka dalam memperbaiki pembangunan dan demokrasi Indonesia. **Ketujuh**, penelitian ini berbentuk publikasi buku yang dilakukan oleh Ah Maftuchan dkk dengan judul penelitian Mengukur Indeks Tata Kelola *Civil Society Organizations (CSOs)* dalam Penguatan Demokrasi

¹⁸ A. G. Herdiansah, "Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia", (Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 1, no. 1, 2016): 49-67.

Substantif di Indonesia.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang tata kelola dan kontribusi Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organizations/CSOs*) dalam memperkuat demokrasi substansial di Indonesia. Penelitian ini juga mendeskripsikan mengenai CSOs yang dipandang memiliki peran yang kuat dalam memperkuat demokrasi substansial. Metode penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dan kualitatif dengan tipe desain penelitian eksploratori. Penelitian dilakukan pada 99 CSOs yang terletak di Jabodetabek, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, CSOs telah memainkan peran penting dalam memulai transisi menuju demokrasi dan banyak berkontribusi dalam proses konsolidasi demokrasi setelah rezim otoriter. Mereka terlibat dalam pembentukan lembaga quasi-pemerintah dan secara konsisten melakukan advokasi dan memberdayakan masyarakat di tingkat bawah.

Berbagai penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian penulis meliputi pembahasan mengenai pendidikan non-formal. **Kedelapan**, penelitian yang dilakukan oleh Anisaturrahmi dengan judul penelitian Evaluasi Program Pendidikan Non Formal Pada Rumoh Baca Hasan-Savvas di Kota Lhokseumawe.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pendidikan nonformal di Rumoh Baca Hasan-Savvas di Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menemukan taman baca masyarakat di Aceh secara umum. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program tersebut dalam aspek Context, Input, Process, dan Product. Jenis penelitian yang dilakukan adalah evaluasi kualitatif dengan pendekatan fenomenologis studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam evaluasi konteks, tujuan dalam memerangi buta huruf dan keterpinggiran telah tercapai dengan baik secara umum dan konteks program juga telah terlaksana dengan baik. Dalam evaluasi input,

¹⁹ A. Maftuchan et al., "*Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia*", (2021).

²⁰ A. Anisaturrahmi, "Evaluasi Program Pendidikan Non Formal pada Rumoh Baca Hasan-Savvas di Kota Lhokseumawe", (*Pionir: Jurnal Pendidikan* 10, no. 2, 2021).

program menetapkan beragam parameter seperti tingkatan usia, wilayah tinggal, dan latar belakang peserta didik. Sedangkan dalam evaluasi proses, program telah melakukan proses perekrutan peserta didik dan strategi pengelolaan program dengan baik. terakhir, dalam evaluasi produk, peningkatan prestasi dan perubahan perilaku peserta didik makin meningkat ke arah yang lebih baik. **Kesembilan**, penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Hidayat, Ali Anwar, dan Noer Hidayah dengan judul penelitian Pendidikan Non Formal Dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Jalanan.²¹ Penelitian ini membahas tentang pendidikan non formal sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan informal dan melengkapi pendidikan formal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara reduksi dan paparan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanggar seni Sang Bodol memberikan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak jalanan yang menjadi siswa mereka, khususnya keterampilan bermain musik. **Kesepuluh**, penelitian yang dilakukan oleh Sepma Pulthinka Nur Hanip dan A. Munawwir dengan judul penelitian Sekolah Pesisir Juang: Pendidikan Non-Formal Anak Pesisir.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana sekolah Pesisir Juang menerapkan sistem pembelajaran tematik, serta bagaimana hal itu mempengaruhi pemenuhan kebutuhan intelektual anak-anak pesisir di Desa Bintaro, Kecamatan Ampenan, Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis psikologi humanistik yang difokuskan pada kebutuhan manusia secara substansial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan formal tanpa terkecuali, termasuk anak-anak pesisir yang hidup dalam situasi ekonomi yang kurang mampu. Kehadiran sekolah Pesisir Juang menjadi menyegarkan untuk para anak pesisir untuk terus belajar dan mencapai

²¹ M. A. Hidayat, A. Anwar, & N. Hidayah, "Pendidikan Non Formal Dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Jalanan", (EDUDEENA: Journal of Islamic Religious Education 1, no. 1, 2017).

²² A. Munawwir & S. P. N. Hanip, "Sekolah Pesisir Juang: Pendidikan Non-Formal Anak Pesisir", (Jurnal Pendidikan Nonformal 16, no. 1, 2021): 1-11.

cita-citanya dengan memperkenalkan muatan-muatan pembelajaran berbasis lingkungan sekitar.

Penelitian-penelitian selanjutnya menekankan pada aspek pemberdayaan anak jalanan dan anak dhuafa yang dilakukan oleh CSO. **Kesebelas**, penelitian yang dilakukan oleh Fikriryandi Putra, Desy Hasanah, dan Eva Nuriyah dengan judul penelitian Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah.²³ Tulisan ini membahas tentang upaya pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah. Data untuk penulisan ini diperoleh melalui studi literatur dalam bentuk kajian konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terlaksananya program penanganan bagi anak jalanan, di mana salah satunya dilakukan dengan menggunakan pendekatan Rumah Singgah. Pendekatan yang digunakan oleh Rumah Singgah adalah centre-based program dengan fungsi intervensi rehabilitatif. Selain itu, Rumah Singgah juga menggunakan pendekatan community-based dan street-based juga digunakan oleh Rumah Singgah dalam program serta kegiatannya, di mana hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan dengan sasaran meningkatkan kemampuan anak jalanan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendidikan moral. Hal ini bertujuan untuk membantu anak jalanan mendapatkan hak atas kehidupan yang layak. **Keduabelas**, penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Miroso Raharjo dengan judul penelitian Pemberdayaan Anak Jalanan Sebagai Upaya Penyadaran Belajar Melalui Pendidikan Kesetaraan di Kota Samarinda.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan manajemen pembelajaran pendidikan kesetaraan bagi anak jalanan dan mempertegas pemberdayaan mereka sebagai bagian dari program Pendidikan Luar Sekolah. Metode yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal pada tutor pendidikan kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dilakukan melalui kegiatan fasilitasi dan

²³ F. Putra, D. Hasanah, & E. Nuriyah, "Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah", (Share: Social Work Journal 5, no. 1, 2015).

²⁴ K. M. Raharjo, "Pemberdayaan Anak Jalanan Sebagai Upaya Penyadaran Belajar Melalui Pendidikan Kesetaraan di Kota Samarinda", (Jurnal Pendidikan Nonformal 13, no. 2, 2018).

pendampingan dalam setting kelompok. Namun, penggunaan teknik kelompok harus dipertimbangkan dengan baik, terutama dalam pemilihan metode dan pelaksanaannya. Terdapat lima fase dalam pelaksanaannya, yaitu pendekatan, penentuan masalah, pengembangan refleksi kritis, penetapan dan pelaksanaan tindakan, dan evaluasi. Hal ini dapat menjadi panduan bagi tutor pendidikan kesetaraan dalam melakukan pembelajaran yang efektif dan pemberdayaan anak jalanan yang lebih baik melalui pendidikan.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Aribowo dengan judul penelitian Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta.²⁵ Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan program pemberdayaan anak jalanan yang ada di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengembangan model pembinaan yang tepat sesuai kebutuhan dan tuntutan anak jalanan terutama di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan data penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengurangi jumlah anak jalanan, Rumah Singgah Diponegoro berupaya memberdayakan anak jalanan dengan program-programnya seperti identifikasi dan pendampingan, layanan kesehatan, bantuan makanan, pembinaan mental spiritual, beasiswa, dan latihan keterampilan hidup. Rumah Singgah Diponegoro memiliki peran yang penting dalam memberdayakan anak jalanan dan memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, serta bantuan moral dan psikologis yang dibutuhkan.

Keempatbelas, penelitian yang dilakukan oleh Aan Nasrullah dengan judul penelitian Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa

²⁵ I. Aribowo, "Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta", (Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi 3, no. 1, 2009).

(Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur).²⁶ Penelitian ini ditujukan untuk mengamati bagaimana Baitul Mal Hidayatullah (BMH) cabang Malang mengelola serta mendistribusikan dana filantropi (zakat, infaq, şadaqah, dan wakaf) untuk pemberdayaan pendidikan anak masyarakat miskin. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana filantropi yang dikumpulkan oleh BMH Cabang Malang akan disalurkan ke dalam empat program utama, yakni dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin dilakukan melalui tiga program, yaitu Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa). **Kelimabelas**, penelitian yang dilakukan oleh Mustangin, Muhammad Fauzan Akbar, dan Wahyu Novita Sari dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan nonformal bagi anak jalanan. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi anak jalanan bertempat di sekitar jalanan karena bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dari anak jalanan itu sendiri. Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan nonformal juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan memberikan masukan untuk pengembangan program pendidikan.

²⁶ A. Nasrullah, "Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)", (Hunafa: Jurnal Studia Islamika 12, no. 1, 2015): 1-18.

²⁷ M. Mustangin, M. F. Akbar, & W. N. Sari, "Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan", (International Journal of Community Service Learning 5, no. 3, 2021): 234-241.

Tabel 1. 1
Tinjauan Literatur Sejenis

No	Judul Penelitian	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aspinwall, M. (2021). Bringing rights to life: How civil society organizations help guarantee participation rights in developing countries. <i>Journal of The Extractive Industries and Society</i> , Vol 8, 1-8. https://bit.ly/3zUnGNw Jurnal Internasional	Partisipasi, Masyarakat Sipil, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Kualitatif dengan sumber utama melalui wawancara, laporan CSO, dan sumber sekunder.	Memiliki persamaan dalam pembahasan mengenai bagaimana organisasi masyarakat sipil berperan di dalam masyarakat.	Penelitian ini memberikan deskripsi mengenai peran kunci CSOs dalam memperbaiki kekurangan negara secara luas. Sedangkan penulis berfokus pada peran CSOs dalam pemberdayaan pendidikan anak.
2	Bajauri, I., Riaz, S., & Rasheed, S. (2016). Role of Civil Society Organizations in FATA Education. <i>Journal of Global Social Sciences Review</i> , Vol. I, No. I Page: 39 - 47. https://bit.ly/43tjLoD Jurnal Internasional	Masyarakat Sipil, Pendidikan, Pemuda, FATA.	Kualitatif, terdiri dari wawancara langsung mendalam dan FGD.	Penelitian ini dan penulis sama-sama menjelaskan dampak langsung atau tidak langsung CSOs terhadap pendidikan.	Dalam penelitian ini fokus pembahasan lebih mengarah pada dampak terhadap sistem pendidikan secara luas. Sedangkan penulis berfokus pada dampak pemberdayaan pendidikan anak yang dilakukan oleh CSO.
3	Belaid, Y. N. (2021). Participatory governance in Moroccan education: What role for civil society organizations (CSOs)?. <i>International Journal of Humanities and Social Science</i> ,	Organisasi Masyarakat Sipil, Partisipasi, Pendidikan, Tata Kelola, Kebijakan, Kewarganegaraan.	Menggunakan survei dan wawancara dengan berbagai CSOs Maroko yang bekerja di bidang pendidikan.	Memberikan penjelasan mengenai praktik CSOs dan hubungannya dalam layanan pendidikan.	Praktik CSOs yang dibahas dalam penelitian ini lebih menyorot pada dampak praktik tersebut terhadap reformasi

No	Judul Penelitian	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	9(6):2321-9467. https://bit.ly/3KCTdsW Jurnal Internasional				administrasi pendidikan. sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada dampak terhadap pendidikan anak dalam berbagai aspek.
4	Bromley, P., Schofer, E., & Longhofer, W. (2018). Organizing for Education: A Cross-National, Longitudinal Study. <i>International Society for Third-Sector Research</i> , 29(3). https://bit.ly/414j17H Jurnal Internasional	Pendidikan, Teori Kelembagaan, Nirlaba, Organisasi Masyarakat Sipil	Menggunakan model regresi data panel.	Baik penelitian ini maupun penelitian penulis, keduanya sama-sama membahas keterkaitan CSOs dengan pendidikan.	Selain membahas mengenai CSO, penelitian ini juga membahas <i>International Non-Governmental Organization</i> (INGO). Sedangkan penulis hanya berfokus pada pembahasan mengenai CSO.
5	Damoah, B., & Adu, E. (2022). Environmental Education in South African Schools: The Role of Civil Society Organizations. <i>Journal of Research in Social Sciences and Technology</i> , 7(3):1-17. https://bit.ly/43xGeRC Jurnal Internasional	Organisasi Masyarakat Sipil, Pendidikan Lingkungan Hidup.	Kualitatif dengan desain fenomenologis yang bersandar pada pandangan filosofis Bronfenbrenner.	CSOs sama-sama dianggap memainkan peran penting yang berhubungan dengan bidang pendidikan.	Penelitian ini memusatkan pembahasan pada Pendidikan Lingkungan Hidup atau Environmental Education (EE). Berbeda dengan penulis yang memusatkan pembahasan pada pendidikan anak dalam aspek kognitif dan sosio-emosional.

No	Judul Penelitian	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Herdiansah, A. G., Randi. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. <i>Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi</i> , 1(1), 49-67. http://bit.ly/3ZosG7t Jurnal Nasional	<i>Civil Organizations, NGOs, Democracy, Development, Civil Society.</i>	Data diperoleh melalui kajian literatur.	CSOs sama-sama dilihat sebagai pihak yang berperan dalam menopang pemberdayaan masyarakat.	Penelitian ini menyorot peran CSOs dalam memantau dan terlibat dalam kebijakan atau program pembangunan secara luas, sedangkan penulis spesifik pada peran CSOs terhadap pemberdayaan pendidikan anak.
7	Anisaturrahmi, A. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Non Formal pada Rumoh Baca Hasan-Savvas di Kota Lhokseumawe. <i>Pionir: Jurnal Pendidikan</i> , 10(2). http://bit.ly/3GIWD1B Jurnal Nasional	Evaluasi Program, Pendidikan, Non Formal	Evaluasi kualitatif dengan pendekatan fenomenologis studi lapangan.	Pendidikan non-formal menjadi program utama yang dibahas dalam penelitian ini dan juga dalam penelitian penulis.	Penelitian ini lebih berfokus pada evaluasi terhadap program pendidikan formal, sedangkan penulis akan lebih mendeskripsikan program pendidikan formal itu sendiri serta dampaknya.
8	Hidayat, M. A., Anwar, A., & Hidayah, N. (2017). Pendidikan non formal dalam meningkatkan keterampilan anak jalanan. <i>EDUDEENA: Journal of Islamic Religious Education</i> , 1(1), 31-42. http://bit.ly/40p3jUz Jurnal Nasional	Pendidikan Non Formal, Keterampilan dan Anak Jalanan	Kualitatif-deskriptif dengan cara reduksi dan paparan data.	Penyelenggaraan pendidikan non-formal dilihat sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada anak.	Keterampilan anak dalam bidang seni menjadi hal yang ditekankan dalam pendidikan nonformal penelitian ini, sedangkan penulis lebih menekankan pada pendidikan

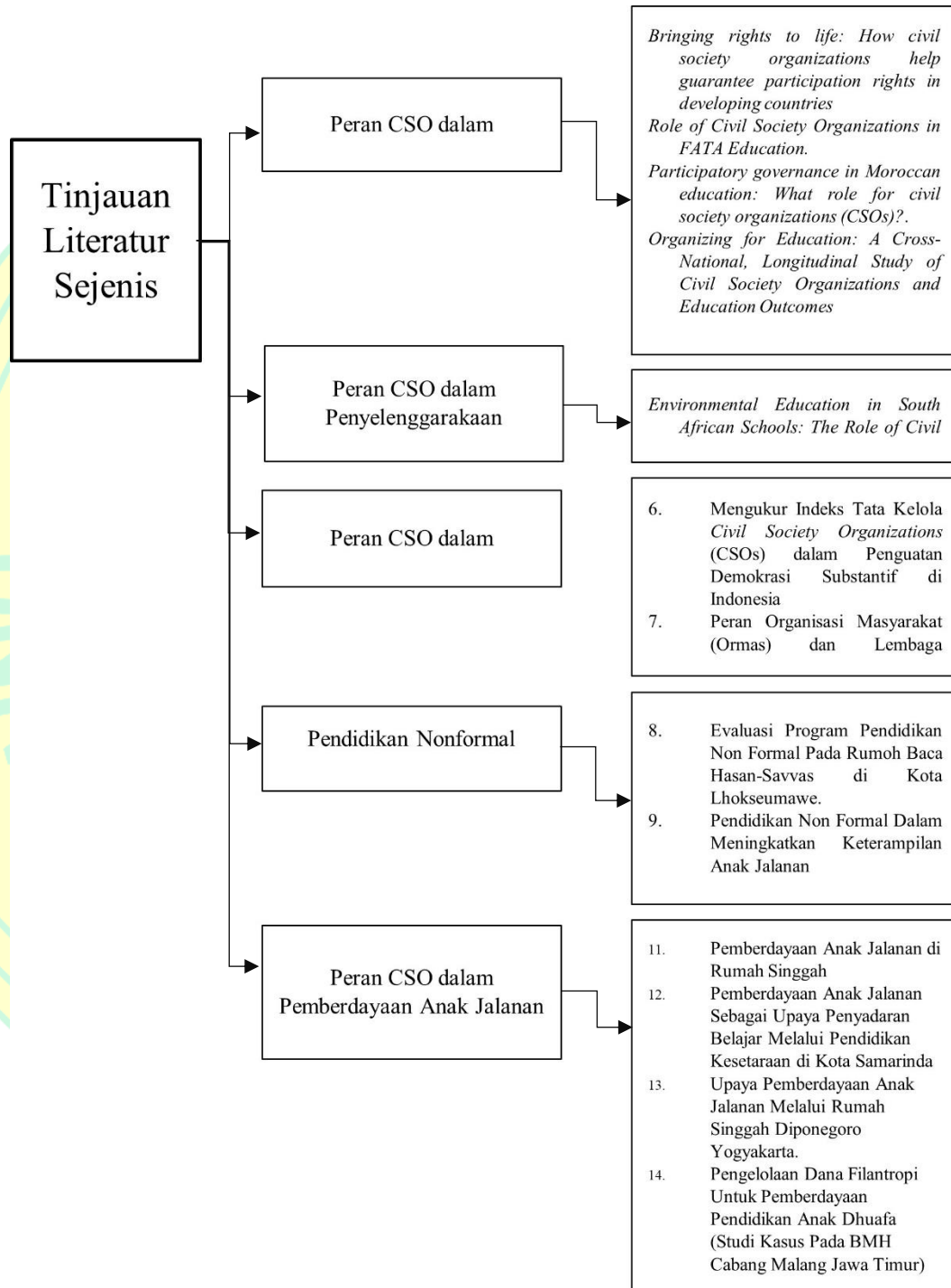
No	Judul Penelitian	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					kognitif dan sosio-emosional.
9	Putra, F., Hasanah, D., & Nuriyah, E. (2015). Pemberdayaan anak jalanan di rumah singgah. Share: Social Work Journal, 5(1). http://bit.ly/42M4hvy Jurnal Nasional	Pemberdayaan, Anak Jalanan, Rumah Singgah	Data diperoleh melalui studi literatur yang berbentuk kajian konseptual.	Pemberdayaan sama-sama dilakukan dengan target meningkatkan kemampuan anak melalui pendidikan.	Target sasaran program adalah spesifik anak jalanan, dan pendekatan yang digunakan adalah Rumah Singgah. Sedangkan penulis dalam menjelaskan target program lebih variatif, dan pemberdayaan dilakukan oleh sebuah CSOs yang merekrut pengajar secara sukarela.
10	Raharjo, K. M. (2018). Pemberdayaan anak jalanan sebagai upaya penyadaran belajar melalui pendidikan kesetaraan di kota samarinda. Jurnal Pendidikan Nonformal, 13(2), 63-69. http://bit.ly/3zbLk8b Jurnal Nasional	Pemberdayaan, Anak Jalanan, Pendidikan Kesetaraan.	Kualitatif menggunakan rancangan studi kasus berupa kasus tunggal.	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah memiliki fokus pembahasan yang sama, yaitu hal pemberdayaan anak melalui pendidikan.	Target anak yang dimaksud spesifik anak jalanan, dan tulisan ini lebih memperhatikan metode yang tepat dalam proses mendidik anak-anak tersebut. Sedangkan penulis lebih fokus pada deskripsi program pemberdayaan anak melalui pendidikan itu sendiri.
11	Aribowo, I. (2009). Upaya pemberdayaan anak jalanan melalui	Anak Jalanan, Pemberdayaan, Rumah Singgah	Kualitatif deskriptif menggunakan observasi,	Program pemberdayaan anak menjadi pusat	Penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda

No	Judul Penelitian	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	rumah singgah diponegoro Yogyakarta. Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi, 3(1). http://bit.ly/3G02jOi Jurnal Nasional		wawancara, dan dokumentasi.	pembahasan. Salah satu program yang diutamakan dalam pemberdayaan ini adalah dengan membangun potensi anak.	dengan penulis. Di mana dalam penelitian ini lebih menyorot bagaimana cara menemukan pengembangan model pembinaan yang tepat melalui pendekatan Rumah Singgah bagi anak jalanan.
12	Nasrullah, A. (2015). Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur). Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 12(1), 1-18. http://bit.ly/40EVARV Jurnal Nasional	Filantropi, Pendidikan Anak Dhuafa	Kualitatif dengan desain penelitian studi kasus.	Memberikan deskripsi tentang pemberdayaan pendidikan anak melalui program-program tertentu.	Tujuan dari penelitian ini lebih berfokus untuk mengamati bagaimana Baitul Mal Hidayatullah (BMH) mendistribusikan dana filantropi dalam pemberdayaan pendidikan anak.
13	Mustangin, M., Akbar, M. F., & Sari, W. N. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan. International Journal of Community Service Learning, 5(3), 234-241. http://bit.ly/40IIqtb Jurnal Nasional	Anak Jalanan, Evaluasi, Pendidikan Nonformal	Kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen.	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada pelaksanaan pendidikan nonformal yang dilihat dapat menjadi alternatif pemberdayaan anak.	Perbedaan penelitian ini terletak pada target pemberdayaan spesifik yakni anak jalanan. Serta pengajaran yang diutamakan adalah dalam hal pendidikan dasar seperti Calistung dan keterampilan hidup.

No	Judul Penelitian	Teori/Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
14	Maftuchan, A., dkk. (2021). Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia. Jakarta: PRAKARSA. https://bit.ly/40EVNEH Jurnal Nasional	Demokrasi, Indeks Tata Kelola CSOs, kontribusi CSOs	Kuantitatif dan kualitatif dengan tipe desain penelitian eksploratori.	Memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana CSOs berperan di dalam masyarakat.	Fokus penelitian ini lebih mengarah pada peran CSOs dalam melakukan advokasi dan memberdayakan masyarakat di tingkat bawah. Sedangkan penulis berfokus pada peran CSOs dalam bidang pemberdayaan pendidikan anak.
15	Munawwir, A., & Hanip, S. P. N. (2021). Sekolah Pesisir Juang: Pendidikan Non-Formal Anak Pesisir. Jurnal Pendidikan Nonformal, 16(1), 1-11. https://bit.ly/3ZpBn8 Jurnal Nasional	Pendidikan Non Formasi, Anak Pesisir	Kualitatif dengan menggunakan analisis psikologi humanistik.	Persamaan penelitian terletak pada konsep utama yang dibahas yaitu pendidikan nonformal bagi anak.	Dalam penelitian ini, upaya pemberdayaan pendidikan anak spesifik menargetkan anak-anak di daerah pesisir. Serta pembelajaran yang diberikan adalah berbasis lingkungan sekitar.

(Sumber: Analisis Penulis, 2023)

Skema 1. 1
Tinjauan Literatur Sejenis



(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Peran sebagai Bentuk Kontribusi

Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁸ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Peran dilakukan oleh seseorang sehingga peran merupakan serangkaian tindakan yang teratur dan dilakukan oleh seseorang yang ditimbulkan. Peran dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, dan penetapan tujuan. Parwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri, yaitu²⁹:

1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi dan lainlain.
3. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat: sebagai subjek.

1.6.2 Civil Society Organizations

Dalam menjelaskan *civil society organizations*, penelitian ini menggunakan pemikiran Tocqueville sebagai acuan utama. Pertama-tama, bagi Tocqueville *civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan

²⁸ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 212.

²⁹ Soehendy, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Lahan*”, (Tangerang: Tesis, 1997), hlm. 28.

(*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.³⁰

Civil society, sebagai ranah politik, mencakup ranah di mana perilaku, perbuatan, dan kontemplasi otonom yang berkelanjutan dilindungi, dibebaskan dari kungkungan kehidupan material, dan terlepas dari keterikatan lembaga politik formal. Ini menggarisbawahi pentingnya domain publik yang tidak dibatasi, ruang di mana individu dapat terlibat dalam pertukaran komunikasi tanpa hambatan. Berdasarkan pemahaman *civil society* tersebut di atas, maka ia terwujud melalui beragam kelompok dan perkumpulan yang dibentuk oleh individu-individu yang terlepas dari pengaruh negara. Perwujudan dalam kelompok atau perkumpulan itulah yang dimaksud Tocqueville sebagai *Civil Society Organizations* (CSO).

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai CSO secara spesifik ditekankan dalam hal peran CSO itu sendiri. Dengan kata lain, penelitian ini menekankan pada bagaimana fungsi CSO dilihat dalam kehidupan masyarakat. Pertama-tama, banyak karya ilmiah di Amerika Utara dan Eropa Barat mengaitkan asosiasionisme dan sektor ketiga dengan gagasan masyarakat sipil. Berdasarkan definisi Walzer, masyarakat sipil adalah "ruang di mana warga dan organisasi tidak dibatasi oleh pemerintah dan dapat membentuk kelompok dan jaringan tanpa gangguan".³¹ Dalam arti ini, masyarakat sipil mencakup semua aspek organisasi internasional, bukan hanya organisasi nirlaba atau sukarela. Dalam masyarakat sipil, sektor ketiga bersifat unik karena membantu orang mengalihkan perhatian mereka dari masalah pribadi ke masalah masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sektor ketiga berfungsi sebagai alat untuk mendorong keterlibatan masyarakat.³²

³⁰ Muhammad AS Hikam, "*Demokrasi dan Civil Society*", (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), hlm. 3.

³¹ Meghan Elizabeth Kallman & Terry Nichols Clark, "*The Third Sector: Community Organizations, NGOs, and Nonprofits*", (Chicago, University of Illinois Press, 2016), hlm. 54.

³² *Ibid.*,

Hubungan masyarakat sipil, khususnya sektor ketiga, sangat berbeda dengan negara di seluruh dunia. Sektor ketiga muncul tanpa hubungan langsung dengan pemerintah selama bertahun-tahun. Tugasnya adalah untuk mengisi "lubang" dalam penyediaan layanan yang pemerintah lewatkan atau mendukung kebijakan sosial tertentu, kadang-kadang bertentangan dengan kebijakan negara.³³ Salah satu dari tiga kategori hubungan pemerintah-organisasi nirlaba adalah suplementer, komplementer, atau adversarial. Dalam perspektif suplementer, jenis hubungan ini terjadi ketika organisasi nirlaba dianggap memenuhi kebutuhan barang publik yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya, seiring pemerintah mengambil lebih banyak tanggung jawab, lebih sedikit uang yang perlu dikumpulkan melalui sarana sukarela kolektif. Ini adalah wacana Tocquevillian, yang sering dianggap sebagai hubungan antara rakyat dan pemerintah.³⁴

Dalam perspektif komplementer, organisasi nirlaba dianggap sebagai mitra pemerintah, membantu melaksanakan penyampaian barang publik, yang sebagian besar didanai oleh pemerintah itu sendiri. Dalam perspektif ini, pengeluaran pemerintah dan nirlaba berhubungan langsung satu sama lain: semakin banyak pengeluaran pemerintah, semakin banyak nirlaba yang didanai. Dalam perspektif ini, sektor sukarela dianggap sebagai "pemerintahan pihak ketiga" yang melengkapi inisiatif negara dan kadang-kadang didanai langsung oleh mereka.³⁵ Selain itu, dalam perspektif adversarial, pemerintah berusaha memengaruhi perilaku organisasi nirlaba dengan mengatur layanan mereka dan menanggapi kampanye advokasi mereka. Organisasi nirlaba mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan publik dan mempertahankan pertanggungjawaban kepada publik. Menurut perspektif ini, organisasi dianggap sebagai oposisi yang jelas terhadap "kekuasaan yang ada", secara

³³ Meghan Elizabeth Kallman & Terry Nichols Clark, "*The Third Sector: Community Organizations, NGOs, and Nonprofits*", (Chicago, University of Illinois Press, 2016), hlm. 54.

³⁴ Meghan Elizabeth Kallman & Terry Nichols Clark, "*The Third Sector: Community Organizations, NGOs, and Nonprofits*", (Chicago, University of Illinois Press, 2016), hlm. 55.

³⁵ *Ibid.*,

terbuka kritis, dan kadang-kadang berusaha dengan sengaja untuk melemahkan legitimasi dan stabilitas pemerintah.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, CSO bisa dipahami sebagai pihak yang memiliki peran spesifik mengganti atau bersifat komplemen terhadap negara dan pasar. Negara memiliki kebijakan atau *public service*, sedangkan pasar atau perusahaan memiliki apa yang disebut *corporate social responsibility* (CSR). CSO yang memiliki peran mengganti atau bersifat komplementer dapat disebut sebagai pihak ketiga, setelah negara dan pasar. Secara garis besar, CSO dapat dipahami sebagai perkumpulan sosial yang menyediakan peran alternatif atau melengkapi peran negara dan pasar dalam rangka pembangunan sosial. Dalam penelitian ini, pembangunan sosial yang dimaksud secara spesifik adalah dalam sektor pendidikan. CSO sebagai sektor ketiga juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong keterlibatan masyarakat.³⁷ Dalam konteks mendorong pembangunan sosial dalam sektor pendidikan, CSO dapat mendorong inklusifitas termasuk pada orang-orang yang tergolong penduduk miskin. CSO sebagai organisasi “sukarela” dianggap sebagai “pemerintahan pihak ketiga” yang melengkapi inisiatif negara dan kadang-kadang didanai langsung oleh mereka.³⁸ Berdasarkan peran tersebut, maka CSO dapat memfasilitasi berbagai lapisan masyarakat untuk bisa masuk dalam arus perubahan sosial.

Selain pemahaman mengenai gagasan dan peran CSO di atas, penelitian ini juga mengutip beberapa definisi lain mengenai CSO. *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Civil Society Organizations* (CSOs) atau *Non-Governmental Organization* (NGOs) adalah kelompok warga yang bersifat sukarela dan nonprofit yang diorganisir di tingkat lokal, nasional atau internasional.³⁹

³⁶ Meghan Elizabeth Kallman & Terry Nichols Clark, “The Third Sector: Community Organizations, NGOs, and Nonprofits”, (Chicago, University of Illinois Press, 2016), hlm. 56.

³⁷ Meghan Elizabeth Kallman & Terry Nichols Clark, “*The Third Sector: Community Organizations, NGOs, and Nonprofits*”, (Chicago, University of Illinois Press, 2016), hlm. 54.

³⁸ Meghan Elizabeth Kallman & Terry Nichols Clark, “*The Third Sector: Community Organizations, NGOs, and Nonprofits*”, (Chicago, University of Illinois Press, 2016), hlm. 55.

³⁹ United Nations. Diakses melalui <https://www.un.org/en/civil-society/page/about-us> pada tanggal 10 April 2023.

Berorientasi pada tugas dan digerakkan oleh orang-orang dengan kepentingan yang sama, CSO melakukan berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan keprihatinan warga kepada pemerintah, memantau kebijakan, dan mendorong partisipasi politik di tingkat masyarakat.⁴⁰

Selain itu, CSOs juga didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela, dengan tujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik, serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya tanpa memiliki maksud mengambil keuntungan finansial dari aktivitas yang mereka jalankan.⁴¹ Pembentukan CSOs adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan kelompok yang tidak dapat terpenuhi oleh pemerintah. Dalam praktiknya, CSOs seringkali terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi hak-hak dan kepentingan sosial. Dalam banyak kasus, kehadiran CSOs memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada di luar jangkauan program-program pemerintah.

Selanjutnya, menurut *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) pada 2012, CSOs dapat didefinisikan sebagai semua organisasi non-pasar dan non-negara di luar lingkup keluarga, di mana orang-orang membentuk diri mereka sendiri untuk mengejar kepentingan bersama di ruang publik.⁴² Domain CSOs mencakup berbagai jenis organisasi, termasuk yang berbasis keanggotaan dan berorientasi layanan. Contohnya antara lain organisasi berbasis masyarakat dan asosiasi desa, kelompok lingkungan, kelompok hak-hak perempuan, asosiasi petani, organisasi berbasis agama, serikat pekerja, koperasi, dan asosiasi profesional.

⁴⁰ United Nations. Diakses melalui <https://www.un.org/en/civil-society/page/about-us> pada tanggal 10 April 2023.

⁴¹ Ah Maftuchan, dkk, “*Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia*”. (Jakarta Selatan: PRAKARSA, 2021), hlm. 8.

⁴² *Ibid.*,

CSOs memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi. Untuk memahami lebih lanjut mengenai CSOs, salah satu konsep penting yang perlu diketahui adalah tipologi CSOs. Tipologi CSOs merujuk pada pengelompokan atau klasifikasi berbagai jenis CSOs berdasarkan karakteristik dan tujuannya. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan mengenai beberapa tipologi CSOs dan pentingnya pengelompokan jenis-jenis CSOs dalam memahami peran serta kontribusinya terhadap masyarakat dan negara. Menurut *World Bank* pada tahun 1995, tipologi CSOs dapat diklasifikasikan berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan operasional/pelayanan dan pendekatan advokasi.

Tabel 1. 2
Tipologi CSOs Berdasarkan Tipe Aktivitas

No.	Tipe Aktivitas	Karakteristik
1.	Operasional/ pelayanan CSOs	CSOs dengan pendekatan operasional bertujuan untuk merancang dan melaksanakan proyek terkait dengan pembangunan. Jenis CSOs ini memiliki jumlah yang banyak dan melibatkan kegiatan seperti amal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas melalui pendidikan atau pelatihan, pengorganisasian masyarakat, rehabilitasi, respons bencana, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan intervensi langsung.
2.	Advokasi	CSOs jenis ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan kasus-kasus tertentu. CSOs advokasi dapat berperan sebagai pengawas dan gerakan sosial.
3.	<i>Hybrid</i> (pelayanan dan advokasi)	CSOs tipe ini menggabungkan jenis pelayanan dan advokasi. Meskipun beberapa CSOs memiliki fokus utama pada advokasi atau pemberian layanan, banyak organisasi lain mengejar

No.	Tipe Aktivitas	Karakteristik
		keduanya secara bersamaan atau beralih dari satu kegiatan ke yang lain.

(Sumber: *World Bank*, 1995)

Selain tipologi berdasarkan aktivitas, terdapat tipologi lain yang dapat menjelaskan lebih rinci mengenai peran dan fungsi CSOs. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam orientasi kegiatan yang dapat mempengaruhi cara mereka beroperasi, termasuk tujuan, metode, dan strategi yang digunakan. Oleh karena itu, tipologi CSOs berdasarkan orientasi kegiatan ini dapat memberikan gambaran tentang peran mereka dalam masyarakat dan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Tabel 1. 3
Tipologi CSOs Berdasarkan Orientasi Kegiatan

No.	Orientasi Kegiatan	Karakteristik
1.	Orientasi amal/ charity	Orientasi kegiatan CSOs ini fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. CSOs dengan jenis orientasi ini cenderung menggunakan pendekatan paternalistik top-down dan minim partisipasi dari pihak "penerima manfaat", sehingga penerima manfaat bersifat pasif.
2.	Orientasi pelayanan	Orientasi layanan masyarakat lebih menekankan pada pelayanan masyarakat seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perencanaan keluarga. CSOs dengan jenis orientasi ini berfokus pada melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam pelaksanaannya maupun dalam menerima pelayanan.
3.	Orientasi partisipasi	Orientasi partisipatif dalam CSOs ditandai dengan proyek swadaya yang melibatkan masyarakat setempat, di mana masyarakat turut serta dalam pelaksanaan proyek dengan memberikan sumbangan

No.	Orientasi Kegiatan	Karakteristik
		berupa uang tunai, peralatan, tanah, bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya.
4.	Orientasi pemberdayaan	Orientasi pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemampuan mereka dalam mengendalikan hidup mereka melalui cara yang baik. CSOs dengan jenis orientasi ini bertujuan untuk membantu orang miskin memahami faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan mereka serta memperkuat kesadaran mereka akan potensi mereka sendiri untuk mengendalikan hidup mereka.

(Sumber: Maftuchan, A. dkk, 2021)

Klasifikasi CSOs berdasarkan orientasi memberikan gambaran mengenai sejauh mana keterlibatan masyarakat atau penerima manfaat dalam kegiatan CSOs, mulai dari keterlibatan pasif hingga aktif dalam mencapai kemandirian. Selain orientasi, CSOs juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkat operasionalnya.

Tabel 1. 4
Tipologi CSOs Berdasarkan Tingkat Operasional

No.	Tingkat Operasional	Karakteristik
1.	Organisasi Berbasis Masyarakat (Lokal) atau Tingkat Daerah	CSOs yang beroperasi di tingkat lokal atau daerah umumnya berangkat dari permasalahan khusus yang ada di daerah tersebut.
2.	Organisasi Nasional	CSOs dengan cakupan nasional mengidentifikasi masalah-masalah umum yang dihadapi oleh hampir seluruh wilayah negara, seperti masalah lingkungan, kemiskinan, ketimpangan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

No.	Tingkat Operasional	Karakteristik
3.	Organisasi Internasional	CSOs yang beroperasi di tingkat internasional memiliki karakteristik dalam bekerja sama dengan jaringan organisasi di tingkat regional dan internasional.

(Sumber: Sushant, 2010)

Kemudian, berdasarkan asesmen yang dipublikasi oleh *United States Agency for International Development (USAID)*, profil dan tipologi masyarakat sipil di Indonesia tidak dapat digambarkan secara tepat karena CSOs mengambil berbagai bentuk organisasi dan bekerja di berbagai bidang dan berbagai isu. Oleh karena itu, USAID mengklasifikasikan tipologi CSO menjadi dua kategori, yaitu *non-membership based CSOs* dan *membership-based CSOs*.

Non-Membership Based CSOs:

Kategori ini terdiri dari berbagai jenis CSO yang masing-masing memiliki karakteristik, orientasi, dan tujuan masing-masing.

1. Organisasi Berbasis Isu. Sebagian besar CSOs bekerja pada isu-isu spesifik, seperti pengembangan masyarakat akar rumput, advokasi kebijakan, pengelolaan lingkungan, penguatan masyarakat sipil, tata kelola, dan bidang lain yang mendukung kemandirian masyarakat. Mekanisme utama yang digunakan organisasi ini untuk mencapai tujuan ini adalah advokasi kebijakan (termasuk kesadaran dan mobilisasi masyarakat) dan penyediaan layanan (termasuk pengembangan dan penelitian masyarakat). CSOs berbasis isu dapat menggunakan salah satu atau kedua mekanisme ini dalam menjalankan pekerjaan mereka. Sebagian besar organisasi berbasis isu terdaftar secara hukum sebagai yayasan.

2. Organisasi Amal. Organisasi amal, memberikan bantuan kepada masyarakat, keluarga, dan individu yang membutuhkan, serta kelompok

sosial rentan tertentu. Mereka umumnya adalah CSOs nasional, tetapi mereka bekerja secara langsung dengan target penerima manfaat atau melalui lebih banyak CSOs dan organisasi sosial di tingkat lokal. Sebagian besar pekerjaan mereka didanai melalui sumbangan amal yang mereka minta dari individu dan organisasi.

3. **Organisasi Kuasi-Pemerintah.** Jenis organisasi ini didirikan di bawah rezim Orde Baru untuk melaksanakan program-program pembangunan terpilih — terutama pemberdayaan masyarakat dan penyediaan layanan di tingkat desa.
4. **Organisasi Kesejahteraan Sosial.** Jenis pekerjaan dan status hukum organisasi ini didasarkan pada UU Kesejahteraan Sosial No.6 Tahun 1974 (baru-baru ini diperbarui menjadi UU Kesejahteraan Sosial No 11 Tahun 2009). Organisasi kemasyarakatan pada umumnya melakukan kegiatan yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Mereka bekerjasama dengan berbagai kalangan dalam berbagai masalah kesejahteraan sosial antara lain anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, pengemis, anak jalanan, mantan narapidana, dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi ini memfokuskan kegiatannya pada pelayanan sosial bagi kelompok marginal, pemberian bantuan, bantuan medis, dan rehabilitasi sosial.
5. **Organisasi Semi Bisnis.** Organisasi-organisasi ini didirikan oleh perusahaan swasta atau milik negara, baik untuk melakukan investasi sosial dan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), atau untuk bekerja lebih umum sebagai CSO yang menyediakan layanan. Yayasan seperti Yayasan Mitra Mandiri dan Yayasan Dana Bhakti Astra adalah contoh CSO jenis ini.

Membership-Based CSOs

Sedangkan, CSOs berbasis keanggotaan seringkali berupa organisasi massa, asosiasi, serikat pekerja profesional, serikat pekerja atau jaringan, terutama melayani kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Namun, organisasi ini sekaligus memberikan pelayanan kepada publik. Keanggotaan CSOs dapat diorganisir seputar identitas ekonomi, profesional, sosial, dan/atau agama. Mereka bekerja di berbagai sektor dengan advokasi dan penyediaan layanan sebagai fungsi inti mereka. Sehingga, jika disimpulkan dalam sebuah tabel, perbedaan *Non-Membership Based CSOs* dan *Membership-Based CSOs* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 5
Perbedaan *Non-Membership Based CSOs* dan *Membership-Based CSOs*

<i>Non-Membership Based CSOs</i>	<i>Membership-Based CSOs</i>	
	Anggota Individual	Anggota Organisasi
CSOs dengan basis <i>non-membership</i> biasanya merupakan yayasan.	CSOs dengan basis <i>membership</i> umumnya merupakan perkumpulan.	Jumlah organisasi ini relatif kecil, namun ada beberapa CSO berdasarkan anggota organisasi; misalnya CSO yang beranggotakan beberapa CSOs.

(Sumber: USAID, 2018)

Berdasarkan beberapa definisi dan tipologi CSOs, dapat diambil sebuah simpulan bahwa CSOs bisa memiliki peran yang berbeda-beda tergantung pada tipe aktivitas,

orientasi kegiatan, tingkat operasional, serta keanggotaan CSOs. Maka secara garis besar penulis akan menekankan peran dan fungsi CSOs dengan mengacu pada peran dan fungsi yang dikemukakan oleh PBB. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, PBB menyatakan bahwa CSOs dinilai memiliki peran dalam berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan. Hal ini dapat dikaitkan secara lebih rinci dengan berbagai tipologi CSOs yang sudah dijelaskan selumnya.

1.6.3 Pendidikan Anak Miskin

Pendidikan anak merupakan aspek penting untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat. Berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pendidikan didefinisikan sebagai proses, cara, dan perbuatan mendidik. Definisi lain dari pendidikan menurut KBBI adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian, Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.⁴³ Selain itu, hak untuk mendapat pendidikan juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.⁴⁴ Definisi ini menggarisbawahi pentingnya memberikan anak-anak pendidikan berkualitas sejak usia dini untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi di masa dewasa.

Sedangkan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian,

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

⁴⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.⁴⁵ Per Maret 2023, BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan Indonesia tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan.⁴⁶

Sehingga, dengan demikian pendidikan anak miskin merupakan proses mendidik yang dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan terhadap anak yang tergolong miskin. Dalam hal ini, anak berhak untuk mendapatkan pendidikan di mana haknya diatur dalam undang-undang. Secara spesifik dalam penelitian ini pendidikan anak yang dimaksud adalah pendidikan anak dalam aspek sosio-emosional. Kemampuan sosio-emosional seorang anak mengacu pada kemampuan mereka untuk mengarahkan emosi mereka sendiri dalam hubungannya dengan orang lain, menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia.⁴⁷

1.6.4 Pendidikan Nonformal

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sengaja dan sistematis yang bertujuan untuk mewujudkan suasana dan proses belajar yang kondusif, memungkinkan peserta didik secara aktif mewujudkan potensi dirinya serta mengembangkan kekuatan spiritual, disiplin diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk mengabdikan pada diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan, penjelasan mengenai definisi pendidikan nonformal dijelaskan sebagai berikut:

1. **Joesoef:** mendefinisikan pendidikan nonformal sebagai bentuk komunikasi bertujuan yang terjadi di luar sekolah tradisional, melalui mana individu memperoleh informasi, pengetahuan, pelatihan, atau bimbingan praktis yang relevan dengan usia dan keadaan hidup mereka. Tujuannya adalah untuk

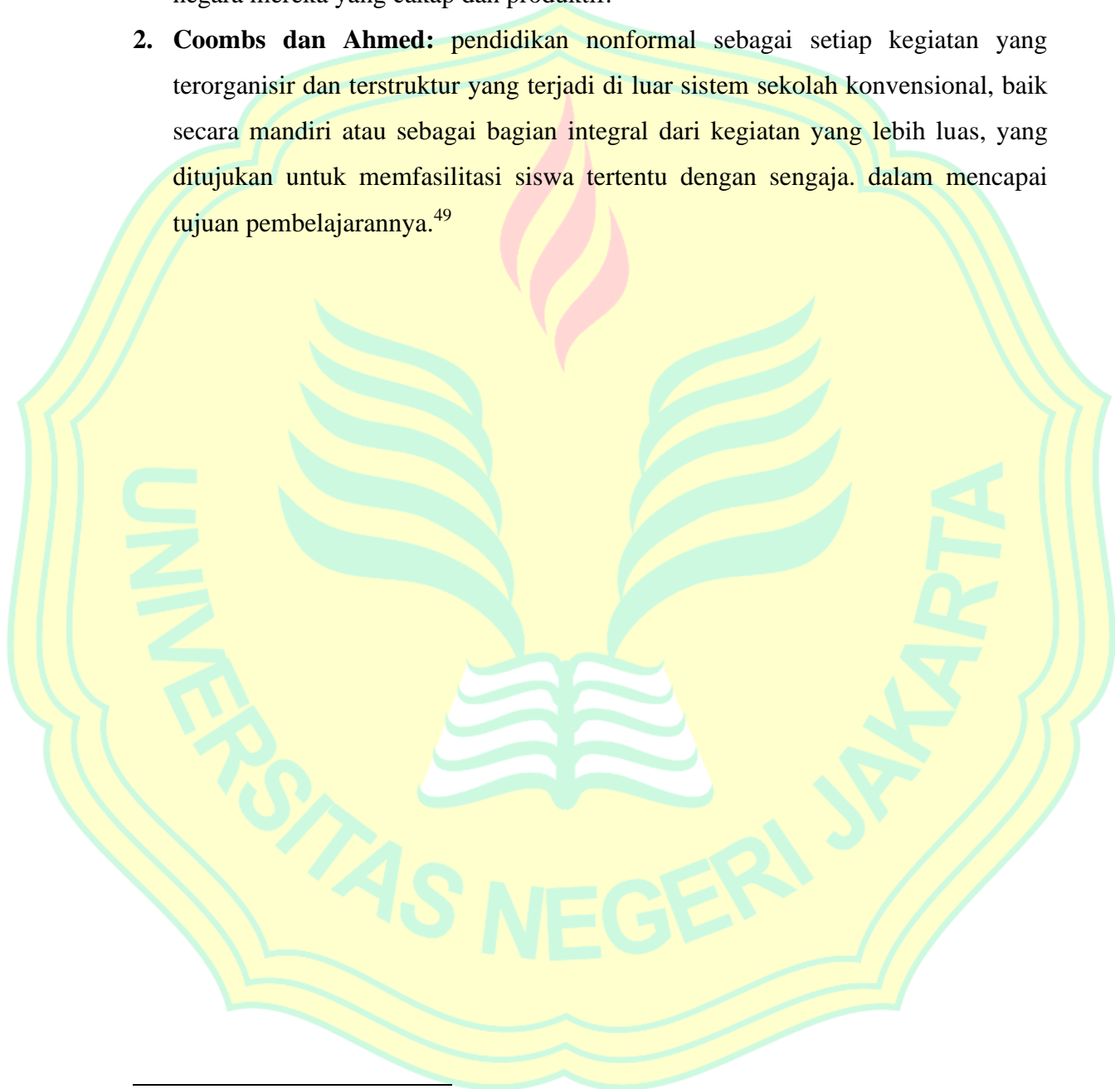
⁴⁵ Badan Pusat Statistik, 2023.

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023," diakses 19 Desember 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

⁴⁷ Ika Agustin Adityawati, dkk, "*Perkembangan Sosio-Emosional Pada Anak Usia Dini*", (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2018), hlm. 36.

mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai mereka, memungkinkan mereka untuk menjadi anggota keluarga, tempat kerja, komunitas, dan bahkan negara mereka yang cakap dan produktif.⁴⁸

2. **Coombs dan Ahmed:** pendidikan nonformal sebagai setiap kegiatan yang terorganisir dan terstruktur yang terjadi di luar sistem sekolah konvensional, baik secara mandiri atau sebagai bagian integral dari kegiatan yang lebih luas, yang ditujukan untuk memfasilitasi siswa tertentu dengan sengaja. dalam mencapai tujuan pembelajarannya.⁴⁹

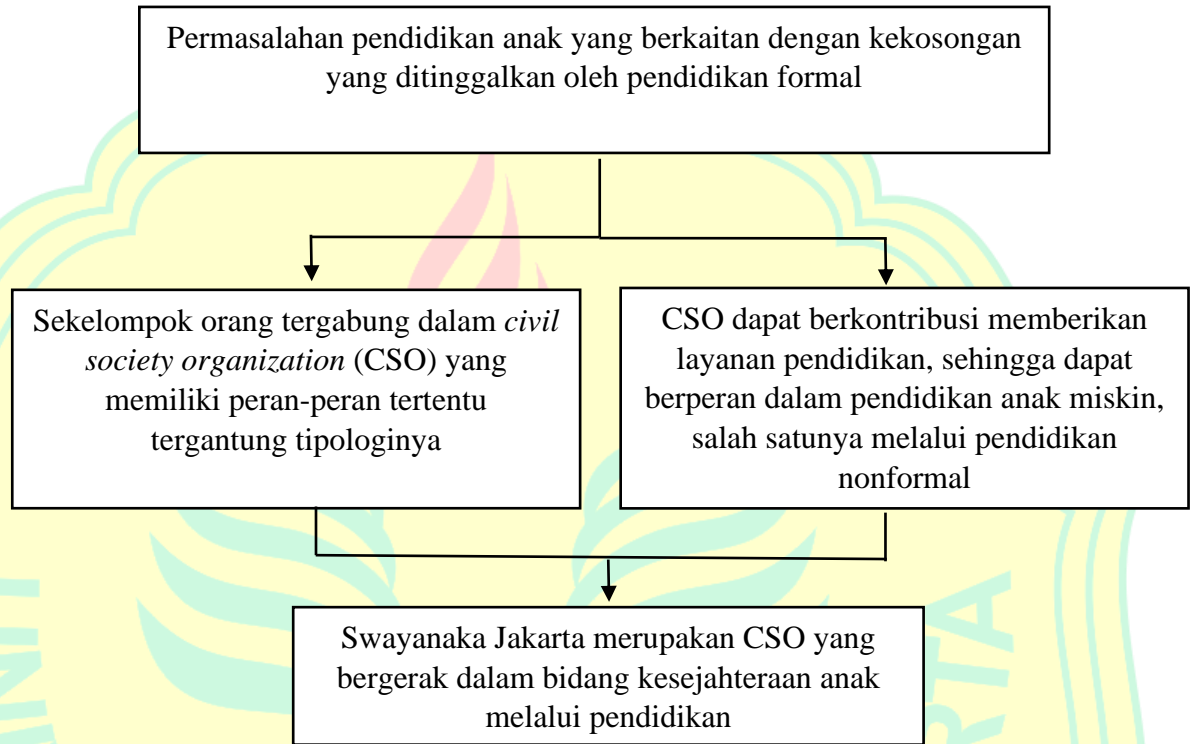


⁴⁸ Soelaiman Joesoef, *"Konsep Dasar Pendidikan Non Formal"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). hlm. 56.

⁴⁹ Philip H. Coombs, Manzoor Ahmed, *"Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help"*, (Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1974). hlm. 39.

1.6.5 Kerangka Pemikiran

Skema 1. 2
Kerangka Pemikiran



(Sumber: Analisis Penulis, 2023)

Swayanaka Jakarta merupakan *civil society organization* yang bergerak dalam bidang kesejahteraan anak, khususnya dalam aspek pendidikan. Sebagai sebuah CSO dengan tujuan menyejahterakan anak, Swayanaka Jakarta melaksanakan berbagai peran sebagai bentuk implementasi dari apa yang menjadi tujuan mereka. Peran tersebut tertuang melalui program-program yang mereka lakukan. Dari berbagai peran yang Swayanaka Jakarta lakukan melalui program mereka, maka hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah peran yang dilakukan CSO berdasarkan tipologinya. Swayanaka Jakarta sendiri berfokus dalam dalam memberikan layanan pendidikan, sehingga dapat disebut sebagai organisasi yang berperan dalam pendidikan anak miskin.

Pada penelitian ini, penulis melihat Swayanaka Jakarta sebagai CSO yang bergerak dalam bidang kesejahteraan anak melalui pendidikan, yang kemudian dapat menjadi jalan bagi mereka untuk melaksanakan program-program dalam aspek pendidikan anak. Dalam hal ini, pendidikan yang dilakukan oleh Swayanaka Jakarta adalah dengan memberikan pendidikan nonformal terhadap target sasaran program mereka. Melalui pendidikan nonformal inilah Swayanaka Jakarta bisa mewujudkan tujuan organisasi mereka yakni untuk menyejahterakan anak melalui pendidikan.

1.7 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipilih adalah kualitatif, yang terdiri dari tiga elemen kunci: ketergantungan pada interpretasi penulis terhadap materi pelajaran, pengamatan rinci dan mendalam, dan analisis berbasis fakta.⁵⁰ Penulis memilih penelitian kualitatif karena membantu mengungkap makna perilaku manusia dalam situasi tertentu, seperti yang dirasakan oleh penulis. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat ideal untuk meneliti fenomena yang melibatkan individu manusia.

Selain itu, penulis menggunakan jenis metode kualitatif tertentu, yaitu studi kasus. Hal tersebut untuk menggambarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui pernyataan lisan oleh informan, sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah disiapkan. Alasan utama untuk menggunakan metodologi ini adalah untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang fenomena atau peristiwa yang dimaksud. Hasil penelitian akan menghasilkan data berupa deskripsi tertulis tentang subjek dan perilaku yang diamati.

1.7.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian, individu yang bersedia dan mampu memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi biasanya disebut sebagai "informan". Informan ini memiliki pengetahuan yang sangat penting bagi pencarian

⁵⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2022).

data oleh peneliti, dan karena itu dianggap sebagai sumber daya yang berharga dalam proses penelitian. Pada penelitian ini penulis menentukan informan atau narasumber yang terdiri dari 2 kategori, yakni kategori pihak Swayanaka Jakarta dan kategori sasaran program. Untuk kategori pihak Swayanaka Jakarta terdiri dari 2 pengurus inti Swayanaka Jakarta (informan NNS dan AG), 1 orang sukarelawan yang mengajar dalam program mengajar di Swayanaka Jakarta (informan SAR), dan 1 orang pendiri Swayanaka Indonesia (informan NS). Sedangkan, untuk kategori informan sasaran program, terdiri dari 4 orang tua murid yang menjadi target sasaran program pengajaran Swayanaka Jakarta (informan YE, NH, MS, dan MH), yang memenuhi karakteristik informan sesuai dengan penelitian penulis yakni yang tergolong penduduk miskin. Selain itu, untuk memperkuat analisis, penulis juga menjadikan seorang psikolog anak sebagai narasumber dalam penelitian ini.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah yang ditunjuk tempat berlangsungnya kegiatan penelitian. Identifikasi lokasi penelitian bertujuan untuk mengefektifkan dan menentukan dengan tepat wilayah yang diteliti. Penulis memilih wilayah Penjaringan, Jakarta Utara sebagai lokasi penelitian. Penjaringan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program karena wilayah tersebut yang cenderung padat masih terdapat banyak pemukiman kumuh. Wilayah penelitian menyesuaikan di mana Swayanaka Jakarta menyelenggarakan program-programnya, akan tetapi wilayah tersebut adalah yang termasuk ke dalam wilayah DKI Jakarta sebab penulis secara spesifik meneliti Swayanaka Jakarta. Penelitian dijadwalkan berlangsung antara Mei dan Juni 2023.

1.7.3 Peran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis memainkan peran ganda, termasuk sebagai perencana, pengumpul data, analis, dan inisiator penelitian. Secara terus menerus, penulis memegang posisi penting dalam melakukan penelitian. Untuk membantu

pendataan di lapangan, penulis memanfaatkan catatan dan perekam suara sebagai alat pendataan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi penelitian ilmiah, yang menekankan pentingnya penulis secara aktif terlibat dan berinteraksi dengan individu yang memiliki informasi yang relevan. Selain itu, pengumpulan data pelengkap dan dokumentasi sangat penting untuk kelengkapan dan optimalisasi hasil penelitian.

1.7.4.1 Observasi

Melalui tindakan observasi, penulis dapat meneliti objek penelitian secara cermat dan teliti. Misalnya, penulis dapat meneliti suatu kegiatan dan menerjemahkan sebuah pengamatan yang telah dilakukan ke dalam bahasa verbal. Selain itu, penulis akan menganalisis dan mendokumentasikan temuan-temuan di lokasi penelitian untuk memfasilitasi pengamatan menyeluruh terhadap lokasi yang sedang diselidiki. Observasi dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 01 Pejagalan. Hal tersebut dilakukan untuk mengamati secara langsung proses program Swayanaka *On Coming School*.

1.7.4.2 Wawancara

Wawancara mendalam digunakan oleh penulis untuk mengetahui pandangan dan pemikiran informan mengenai objek penelitian. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka di lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan program Swayanaka Jakarta. Wawancara dilakukan dengan sembilan informan. Masing-masing wawancara dilakukan sebanyak satu kali terhadap informan.

1.7.4.3 Dokumen dan Studi Pustaka

Dokumen berfungsi sebagai sumber data yang berisi catatan peristiwa masa lalu. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, gambar, dan media lainnya, asalkan relevan dengan topik penelitian. Akses ke dokumen semacam itu sangat penting karena memperkuat validitas dan ketepatan pengamatan dan wawancara, dibantu oleh bukti visual seperti penggambaran dan catatan fotografis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data melalui tinjauan literatur publikasi, termasuk jurnal, buku, dan bahan penelitian lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan tiga kegiatan yang saling terkait: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

1. Reduksi Data

Reduksi data meliputi pemilahan, pemisahan, penyederhanaan, dan pemusatan pada data yang terkumpul dari hasil wawancara dengan narasumber data atau informan di lapangan, berdasarkan catatan yang dibuat oleh penulis. Penulis dapat mereduksi data dengan memilih data yang relevan, mengkategorikan data, dan mengkodekan data menggunakan *research grids* yang dibuat oleh penulis.

2. Presentasi Data

Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk skema, tabel dan alat bantu visual lainnya. Penulis juga dapat meminta masukan dari penulis lain untuk memastikan bahwa data terstruktur dengan jelas dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik oleh penulis bersifat tentatif dan dapat berubah. Penulis terbuka untuk saran dari peneliti lain dan akan memperbarui kesimpulan mereka jika bukti baru ditemukan selama penelitian lapangan. Pada

akhirnya, proses berulang ini mengarah pada kesimpulan akhir yang lebih kuat dan meyakinkan.

1.7.6 Triangulasi Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik ini meliputi pemeriksaan silang terhadap data yang dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda, serta mencari pendapat para ahli di lapangan. Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari informan, penulis meminta bantuan informan lain yang masih dalam satu kategori informan yang sama. Hal tersebut penulis lakukan dengan meminta pendapat langsung dari target sasaran program untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari informan yang merupakan pengurus atau sukarelawan Swayanaka Jakarta. Selain itu, penulis juga mewawancarai seorang psikolog anak dan pendidikan yang merupakan ahli di bidang yang sesuai dengan penelitian penulis.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian dibagi menjadi tiga kategori sederhana, yaitu diantaranya ialah Pendahuluan, Isi dan Penutup. Ketiga kategori tersebut akan ditambahkan ke dalam enam bab yang terbagi satu bab pendahuluan, empat bab isi, dan satu bab penutup atau kesimpulan. Sistematika penulisan ini bertujuan agar memudahkan para pembaca dalam membaca hasil penelitian.

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang, rumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, metode hingga teknik yang digunakan. Pada bab ini juga penulis memaparkan kerangka konseptual yang relevan dengan masalah penelitian yang mana menggunakan konsep *civil society organizations*, konsep pendidikan anak miskin, dan konsep pendidikan nonformal. Bab ini juga diperlengkap dengan informasi mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian dan subjek yang dijadikan topik utama dalam penelitian.

Bab II Deskripsi dan Setting Penelitian, Bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai Organisasi Swayanaka Jakarta. Mulai dari sejarah berdiri Swayanaka Indonesia sampai lahirnya regional Swayanaka Jakarta. Pada bab ini juga penulis akan memaparkan konteks sosial lokasi pelaksanaan program Swayanaka Jakarta.

Bab III Temuan Penelitian, Penulis berusaha untuk menggambarkan serta mendeskripsikan hasil temuan lapangan mengenai pelaksanaan program Swayanaka Jakarta dalam pendidikan anak miskin. Program tersebut tertuang dalam bentuk program Swayanaka Jakarta yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

Bab IV Analisis, Selanjutnya, pada bab ini penulis mencoba menganalisis antara temuan di lapangan dengan beberapa konsep yang sudah dibahas pada bab pendahuluan. Penulis akan menjelaskan bahwa Swayanaka Jakarta berperan dalam peningkatan kemampuan sosio-emosional anak. Pembahasan tersebut terbagi menjadi dua kategori, yakni hubungan anak dengan orang tua, serta hubungan anak dengan teman sebaya. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai peran Swayanaka Jakarta dalam melengkapi kekurangan sekolah formal melalui pendidikan nonformal yang diusungnya. Tantangan dalam mengoptimalkan manfaat program juga dijelaskan pada bab ini.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir penelitian yang berisikan kesimpulan dari setiap proses penelitian. Kesimpulan yang dipaparkan ialah jawaban dari keseluruhan penelitian namun dalam bentuk yang lebih sederhana. Pada bab ini juga penulis memberikan beberapa saran untuk berbagai macam pihak.